

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis *Value For Money*

Yulinda Devi Pramita

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Magelang

yulinda@unimma.ac.id

Ilma Filiana

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Magelang

Ilmafiliana4@gmail.com

Betari Maharani

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Magelang

Betari.maharani@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/21867>

ABSTRACT

This research aims to test and analyze empirically the influence of accountability, transparency, participation, supervision and understanding of accounting on the performance of value for money based village fund budgets (empirical study in villages throughout Tempuran sub-district, Magelang district). The data used in this research is primary data. The population of this study was 15 village offices in Tempuran District, Magelang Regency. Meanwhile, the samples in this study were the village head, financial head, Head of Welfare, Head of Development, Head of Hamlet. The sampling technique is using a purposive sampling method. The number of samples used was 15 village offices with a total of 170 respondents. The analytical method used in this research was multiple linear regression analysis. The results of this research show that accountability, transparency, participation, supervision and understanding of accounting have a positive effect on the performance of village fund budgets based on value for money.

Keyword: *budget performance, village funds, value for money, accountability, transparency, supervision, and basic understanding of accounting*

Cara Sitasi : Pramita, Y, D., Filiana, I., Maharani, B.(2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa berbasis *Value For Maney*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 24 (2). Hal 171-188. <https://doi.org/10.30596/21867>

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Akuntansi pemerintahan berperan dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai tata kelola yang baik, mulai dari pengelolaan keuangan pusat, daerah, dan desa. Prinsip akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan bentuk kewajiban tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga bagi daerah seperti desa. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil

penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016). Hal ini menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pelaksanaan kinerja anggaran tersebut menunjukkan adanya *Good Government Governance* (GGG). Implementasi *Good Government Governance* (GGG) dimaksudkan agar tata pengelolaan organisasi sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan dan dapat dipertanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi (Abdul Halim, 2012). Salah satu pengukuran GCG menggunakan kinerja anggaran berbasis *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015:83).

Kinerja anggaran yang bernilai ekonomi menunjukkan penggunaan dana dengan secara sedikit untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian prinsip efisien menunjukkan adanya pengeluaran dana sesuai dengan hasil yang diperoleh. Terakhir prinsip efektivitas menunjukkan keberhasilan dari penggunaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adanya prinsip tersebut dalam kinerja anggaran menunjukkan capaian terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam prosesnya kinerja anggaran ini harus dilakukan secara transparan. Transparansi adalah keterbukaan untuk mengakses dan mengumpulkan informasi, adanya laporan pengelolaan anggaran yang diterbitkan secara berkala, dan agar publik mengetahui kemajuan proses pemerintahan (Budiarto & Puspitasari, 2020: 154). Adanya keterbukaan terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana desa akan menimbulkan suatu kinerja anggaran yang baik. Transparansi akan menampilkan semua informasi kepada masyarakat secara jujur sehingga dapat dipahami dan diawasi oleh pihak yang memiliki kepentingan (Cindy et al, 2018) Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Setiyanningrum, (2017) serta Premananda & Latrini, (2017) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Selain itu, pelaksanaan kinerja anggaran juga perlu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Mahayani, 2017). Adanya akuntabilitas ini menunjukkan suatu pertanggungjawaban oleh perangkat desa dalam penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban ini meliputi seluruh proses kinerja anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa (Mustofa, 2009: 88). Hal ini akan menimbulkan suatu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas penggunaan dana desa yang ada (Mardiasmo, 2006). Beberapa penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran yang berbasis *value for money* ((Ashari & Kaukab, 2020), (Batubara & Risna, 2020); (Budiarto & Puspitasari, 2020). Aspek lain yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran berbasis *value for money* adalah partisipasi. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan sebagai kontrol dengan mengevaluasi terhadap penyalahgunaan wewenang (Utami, 2013: 71). Partisipasi ini dapat dilakukan dengan memberikan masukan terhadap arah kebijakan dalam penggunaan anggaran. Terutama dengan pengusulan program yang dapat membantu masyarakat. Partisipasi ini dapat mempengaruhi kinerja anggaran berbasis *value for money* Premananda & Latrini (2017).

Berikutnya, faktor pengawasan juga sangat mempengaruhi kinerja anggaran yang dilakukan oleh aparat desa. Menurut Makmur (2011: 196) pengawasan adalah suatu bentuk

pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Adanya pengawasan ini akan menjadi suatu kontrol terhadap penggunaan dana desa. Terutama dalam menentukan peruntukan dan proses penggunaannya. Pengawasan yang baik terhadap kinerja anggaran akan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran (Sri Rahayu, 2010). Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Irna & Isroah, 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Selain itu penelitian dari (Batubara & Risna, 2020) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Pengawasan ini juga dapat dilakukan pada proses perencanaan dan pelaporan dana desa. Oleh karena itu pemahaman akuntansi sangat diperlukan untuk mengatur kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Pemahaman akuntansi pada sektor publik tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pemahaman yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Langelo et al., 2015 : 34). Pemahaman ini sangat diperlukan dalam kinerja anggaran berbasis *value for money* dimana bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat dengan selalu menggunakan prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas. *Value for Money* merupakan proses penyusunan anggaran yang didasarkan pada beberapa indikator antara lain ekonomis, efisien dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Adanya beberapa temuan yang menemukan bahwa pengelolaan anggaran yang kurang baik memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip *Value for Money* harus dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 66, dana desa harus dikelola secara efisien dan ekonomis guna memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Tujuannya adalah mencapai target yang telah ditentukan dengan menyusun, menggunakan, dan melaporkan anggaran yang ada. Pemahaman akuntansi yang baik akan memudahkan dalam merencanakan penggunaan anggaran yang sesuai dengan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif (Ashari & Kaukab, 2020).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Ashari & Kaukab (2020) yang meneliti tentang kinerja anggaran *Value for Money*, dengan menggunakan variabel Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Pemahaman Dasar Akuntansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*. Perbedaan penelitian ini, pertama menambahkan variabel partisipasi yang diambil dari penelitian (Batubara & Risna, 2020) karena selama ini partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat kurang maksimal. Musrenbang yang dilakukan tiga sampai empat kali dalam satu tahun belum diimplementasikan secara maksimal. Konsep musyawarah dalam musrenbang menjadi representasi partisipatif. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Praba (2019) menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

Selain itu penelitian dari (Herli & Hafidhah, 2020) bahwa pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat. Peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua objek penelitian ini di Kecamatan Tempuran, karena Tempuran menerima Dana Desa cukup besar di Kabupaten Magelang. Salah satu desa di Kecamatan Tempuran yaitu desa Ringinanom merupakan desa yang mendapatkan dana desa paling banyak karna desa termiskin di Kecamatan Tempuran. Dana desa yang besar ini atas dasar upaya penurunan angka kemiskinan melalui program keroyokan seperti saran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Tempuran, 2021). Oleh karena itu perlu diketahui mengenai kinerja anggaran dana desa berbasis *value for money* dan pengaruhnya dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

KAJIAN TEORI

Stewardship Theory

Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). Teori *stewardship* mengansumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* ini akan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. *Steward* (pengelola) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan organisasi dan *principal* (pemilik). Rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, sebuah hubungan yang dimana ini akan tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, dapat bertanggungjawab, integritas dan jujur kepada pihak lainnya. Berdasarkan teori *stewardship* dapat dikatakan bahwa manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*) bagi kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi (Rigian & Sari, 2019). Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi sebagai *steward* (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa juga diperlukan pemahaman mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa sehingga laporan pertanggungjawaban dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan dibuat tepat waktu.

Akuntabilitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas bisa didefinisikan sebagai suatu pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan secara periodik terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) yang telah dipercayakan kepada suatu pihak. Akuntabilitas juga dipahami oleh (Mardiasmo, 2009: 21) sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Aliyah, Nahar (2012: 17) akuntabilitas keuangan daerah merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan jujur yang dapat diakses dalam bentuk presentasi melalui berbagai media informasi. Indikator akuntabilitas dipaparkan oleh Ashari & Kaukab (2020) sebagai berikut pertanggungjawaban anggaran, penyajian anggaran, keterlibatan masyarakat, kerahasiaan anggaran.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan untuk mengakses dan mengumpulkan informasi, adanya laporan pengelolaan anggaran yang diterbitkan secara berkala, dan agar publik mengetahui kemajuan proses pemerintahan (Budiarto & Puspitasari, 2020: 154). Salah satu aspek mendasar dari transparansi adalah keterbukaan dalam mengakses dan mengumpulkan informasi (Rigian & Sari, 2019). Pemerintah harus menjamin transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas rakyat. Transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah harus memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya digunakan oleh Pemangku Kepentingan dalam pengambilan keputusan (Hehanussa, 2015). Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2006). Transparansi merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan utama mewujudkan penyelenggaraan negara yang profesional, terjaminnya keamanan hukum, transparansi, akuntabilitas, peka dengan segala manfaat, bentuk tanggung jawab publik dan integritas dalam memenuhi misi perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara (Mustopadidjaya A. R., 2003) Transparansi anggaran dapat digunakan sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi memungkinkan publik untuk mengevaluasi dan mengkritik semua kebijakan pemerintah (Hermanto et al., 2021). Indikator tranparansi menurut (Royman, 2020) adalah sebagai berikut sistem keterbukaan kebijakan anggaran, kemudahan akses dokumen anggaran, pelaporan pertanggungjawab yang tepat waktu, terakomodasinya suara rakyat, sistem pemberian informasi kepada publik.

Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi dengan orang-orang dengan tujuan dan kebutuhan yang sama dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Theresia Dwi Hastuti & Imam Ghozali, 2015). Partisipasi adalah keterlibatan dua orang atau lebih dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang akan berdampak pada orang-orang yang bekerja di sana (Ridha et al., 2017: 79). Untuk mencapai efisiensi anggaran yang baik, efektif dan efisien membutuhkan partisipasi (Ridha et al., 2017). Partisipasi anggaran adalah pengaruh langsung dalam meningkatkan kinerja karena keterlibatan dari para pegawai dalam menyusun anggaran meningkatkan komitmen sehingga berpengaruh pada kinerja (Hasmawati et al., 2011). Sedangkan Menurut (Yanti, 2020), partisipasi anggaran diartikan sebagai pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajernya yang akan bertanggung jawab atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi

dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Indikator adanya partisipasi disebutkan oleh (Royman, 2020) sebagai berikut memiliki pengaruh penyusunan anggaran, motivasi kerja, pendapat dalam menyusun anggaran, kepuasan menyusun anggaran, keandalan waktu.

Pengawasan

Menurut (Handayani et al., 2018) pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Pengawasan adalah proses pemantauan kinerja karyawan terhadap untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas tinjauan kinerja, dan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai umpan balik atas pencapaian hasil. Hasilnya dikomunikasikan kepada karyawan (Pertiwi, 2015: 73). Sementara pengawasan keuangan negara adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan yang ditetapkan (Ulum, 2009: 196). Pengawasan adalah kegiatan yang menargetkan semua kegiatan pemerintah melalui peninjauan, diharapkan semua kegiatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Setiyanningrum & Isra, 2017: 96).

Pemahaman Akuntansi

Pemahaman SAP adalah upaya untuk menafsirkan makna yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Langelo *et al.*, 2015: 34).

Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Menurut Bastian (2010: 171) dijelaskan bahwa “Kinerja anggaran adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi.” *Value for money* adalah prinsip manajemen organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* dapat dicapai jika organisasi telah menggunakan biaya input terkecil untuk mencapai output yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi (Iswahyudi et al., 2017: 158). Sektor publik seringkali dipandang sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* adalah pengukuran kinerja anggaran di sektor publik yang didasarkan pada konsep penghargaan pada penggunaan yang efisien, efektif, dan ekonomi (Adrianto, 2007: 21). Menurut (Mahmudi, 2015; 83) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut (Royman, 2020), indikator kinerja berbasis *value for money* diantaranya yaitu sebagai berikut menghindari pengeluaran

yang boros, cermat dalam pengadaan sumber daya, penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu, menurunkan biaya pelayanan kinerja publik, tingkat hasil pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau pelayanan tepat sasaran, kesempatan sosial yang sama dan alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan bentuk hubungan kausal yang merupakan hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan dependen

Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam penelitian ini Aparatur Desa yang terdiri dari Kepala desa, KAUR Keuangan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pembangunan. memiliki masa kerja minimal 6 bulan serta berpendidikan minimal SLTA/Sederajat dengan anggapan minimal mereka mampu memahami dan menguasai permasalahan yang diangkat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara survei, dengan memberikan kuisisioner yang langsung disebarkan kepada pegawai pengelola keuangan desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. **Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan implementasi aplikasi siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 A + \beta_2 T + \beta_3 P + \beta_4 PW + \beta_5 PA + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1
Koefisien Regresi

Keterangan	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,532	0,149		3,517	0,001
A	0,178	0,099	0,169	2,803	0,007
T	0,011	0,063	0,010	2,170	0,009
P	0,040	0,039	0,043	3,017	0,031
PW	0,842	0,037	0,919	22,793	0,000
PA	0,125	0,103	0,100	2,210	0,002

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 32,532 + 0,178 A + 0,011T + 0,040 P + 0,842 PW + 0,125PA + e$$

Uji koefisien determinan yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Hasil analisis koefisien determinasi disajikan dalam tabel 4.9.

Tabel 2
Uji R²

R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
0,946	0,895	0,892	0,16750

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* pada Tabel 2 besarnya R² sebesar 0,892 ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, dan Pemahaman Akuntansi sebesar 89,2% sedangkan sisanya adalah 10,8% (100% - 89,2%) hal ini dijelaskan oleh faktor lain dari luar model penelitian ini. Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual (*Goodness of fit*). Ketentuan ini menilai hasil hipotesis uji F merupakan level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang df – k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1. Hasil uji F dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 3
Uji F

Keterangan	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	34,274	5	6,855	244,330	0,000 ^b
Residual	4,012	143	0,028		
Total	38,286	148			

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Beta	Sig	t _{hitung}	t _{tabel}	Keterangan
A	0,169	0,007	2,803	1,65514	H1 diterima
T	0,010	0,009	2,170	1,65514	H2 diterima
P	0,043	0,031	3,017	1,65514	H3 diterima
PW	0,919	0,000	22,793	1,65514	H4 diterima
PA	0,100	0,002	2,210	1,65514	H5 diterima

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Akuntabilitas aparatur desa, maka akan semakin tinggi pemahaman kinerja anggaran dana desa. Akuntabilitas yang memadai dalam kinerja anggaran dana desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Akuntabilitas merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya. Pengelolaan anggaran di desa–desa kecamatan tempuran melibatkan unsur masyarakat, anggaran dana desa disajikan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat. Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran. Proses

pertanggungjawaban anggaran dana desa diawasi secara terus – menerus yang dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas. Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu, dalam mengevaluasi anggaran membandingkan target dengan realisasinya. Hal ini kaitannya dengan *stewardship* yaitu karakter individu harus memiliki tanggungjawab serta integritas yang tinggi. Terkait kinerja anggaran dana desa seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik untuk dapat mengelola secara ekonomi, efisien dan efektivitas. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dari kinerja pengelolaan dana desa yang berbasis *Value For Money* dengan demikian kinerja anggaran dana desa akan semakin akuntabel.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian penelitian menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif transparansi terhadap kinerja anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Terwujudnya transparansi dilihat dari terciptanya pemerintahan daerah maupun pusat yang bersih, efektif, akuntabel, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat. Kemampuan dan keahlian aparatur desa dalam mengefektifkan transparansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan berbasis *value for money* sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Transparansi berperan sebagai kontrol atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Transparansi memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses penyusunan anggaran, transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan / suara rakyat, dan Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik. Dalam hal ini kaitannya dengan teori *stewardship* yaitu transparansi dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya transparansi dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan anggaran. Pemerintah desa juga dapat mengarahkan semua kemampuannya dalam mengefektifkan transparansi agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil uji penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Premananda & Latrini, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Partisipasi terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian penelitian menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dana desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi partisipasi yang dimiliki oleh aparatur desa maka kinerja anggaran akan semakin baik dan akuntabilitas akan semakin meningkat. Partisipasi melibatkan dua orang atau lebih dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang akan berdampak pada orang-orang yang bekerja di sana (Ridha et al., 2017: 79). Partisipasi anggaran merupakan pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajernya yang akan bertanggung jawab atas kinerja anggaran (Hansen & Mowen, 2013: 223) Sesuai dengan (Royman, 2020: 15) partisipasi meliputi pengaruh penyusunan anggaran, motivasi kerja, pendapat dalam menyusun anggaran, kepuasan menyusun anggaran, dan keandalan waktu. Partisipasi dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran (Safitri, 2019: 7). Dalam teori *stewardship* pelaksanaannya pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan guna mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah dan adanya penerapan partisipasi dalam

organisasi ataupun lembaga untuk menyatukan persepsi antara pemimpin dan pegawai.

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian penelitian menyatakan bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dana desa. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan, maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran desa. Dengan adanya pengawasan, diharapkan target dapat sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya pengawasan akan meningkatkan kinerja anggaran secara optimal. Pengawasan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal, pengawasan anggaran dilakukan oleh Inspektorat Daerah secara rutin, pimpinan secara langsung rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran, kecamatan secara aktif mengawasi mekanisme penggunaan anggaran, dan revisi anggaran dilakukan dengan alasan skala prioritas. Dalam kaitannya dengan teori *stewardship* pemerintah desa akan selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam kinerja anggaran desa dengan transparansi kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab pemerintah desa. Pengawasan dapat memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, dan dapat memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan sesuai dengan target kinerja anggaran dana desa berbasis *value for money* dimana dalam pengelolaan anggaran dana desa selalu menerapkan prinsip ekonomi, efisien, serta efektivitas.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dana desa. Ini menggambarkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran desa. Dengan memahami sistem dan prosedur Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan, Akutansi persediaan, Akutansi investasi, Aset tetap, Konstruksi dalam pengerjaan, Akutansi kewajiban, Koreksi kesalahan, Laporan konsolidasi, dan Laporan Operasional dengan baik akan meningkatkan kinerja anggaran secara optimal. Bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam berproses dan pelaporan. Dalam kaitannya dengan teori *stewardship* yaitu pemahaman akuntansi memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan mencegah terjadinya potensi penyimpangan. Sistem keuangan yang baik memudahkan pengguna dan kebermanfaatannya akan berdampak pada tingginya pencapaiannya akuntabilitas yang tercermin pada aspek kejujuran, ketaatan undang - undang dan proses anggaran dana desa. Pemahaman akuntansi dalam suatu organisasi akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara *value for money* dimana dikelola secara ekonomi, efisien, efektivitas. Semakin baik penggunaan sistem keuangan maka akan semakin baik pula pencapaian akuntabilitasnya.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pemahaman akuntansi terhadap kinerja anggaran dana desa dalam pengelolaan keuangan desa pada kantor desa se-Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 147 responden yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan/bendahara, kepala dusun serta staf lainnya. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Temuan hasil penelitian ini

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengawasan, dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dana desa berbasis *value for money*. Variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengawasan, dan pemahaman akuntansi mempunyai kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen kinerja anggaran dana desa berbasis *value for money* sebesar 89,5% sedangkan sisanya (10,5%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Temuan penggunaan Dana Desa di desa se-Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sangat baik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan Dana Desa telah menerapkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pemahaman akuntansi yang dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan terdapat pengaruh positif antar variabel. Dengan adanya hal tersebut perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa yang baik akan berdampak jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa salah satunya dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

REFERENSI

- Abdul Halim, T. D. (2012). *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* (Kedua). Upp Stim Ykpn.
- Adiwirya, M., & Sudana, I. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611–628.
- Adrianto, N. (2007). *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik. Melalui E-Government*. Bayumedia Publishing.
- Aliyah, Siti ; Nahar, A. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Siti Aliyah Aida Nahar. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97–189.
- Amirul Mustofa. (2009). Perubahan Budaya Public Service Organizations (Psos) Dalam Meningkatkan Kinerja Layanan Publik Amirul Mustofa * Abstract Some Important Aspects Of The Changes In Organizational Culture , At Least Coherently Will Be Discussed In This Paper . Among The Im. *Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 19–28.
- Andrianto, N. (2007). *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Bayumedia.
- Arista, A. . S. A. N., & Suartana, I. W. (2016). Pemahaman Atas Sap Sebagai Pemoderasi Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Kinerja Anggaran Skpd Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1667–1699.
- Artana. (2018). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Artana, A. S. (2016). *Artana, Arlia Sari. 2016. "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."* 14–16.
- Ashari, M. I., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(5).
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116.

- <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Budiarto, D. S., & Puspitasari, M. D. (2020). Meningkatkan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Accounting Global Journal*, 4(2), 153–166. <https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5099>
- Dahlia Dwi Safitri, T. M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Ekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*, 2(2), 1–15.
- Dana, A., Add, D., Kecamatan, D. I., Hilir, M., & Besar, K. S. (2014). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. 1–10.
- Demasya. (2018). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba, And G. G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fernandes, W., Kennedy, K., & Hanif, R. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33992.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakiki, R. M. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money di Kota Mojokerto*. 15(2), 1–23.
- Hamid, A., & Lamuda, I. (2019). Evaluation Of Financial Performance Through Approach To Value For Money Pendekatan Value For Money. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(1), 31–41.
- Handayani, S., Saleh, J., & Ma'ruf, A. (2018). *Keywords : Implementation, Inspectorate Function, And Supervision*. 4(2).
- Hasmawati, A., Laela, S. F., Doktor, K., Ekonomi, F., & Indonesia, U. (2011). *Hubungan Langsung Dan Tidak Langsung Antara*. 6(2), 196–217.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference In Busniess, Accounting And Management*, 2, 82–90.
- Herli, M., & Hafidhah. (2020). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*. V(1), 1–19.
- Hermanto, F. T. W., Widiyanto, A., & Aryanto, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. *Owner*, 5(2), 502–512. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.416>
- Irna Dan Isroah. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah

- (Bumd) Di Yogyakarta. *Jurnal Profita Edisi 3*.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Kemenkeu. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021*.
- Kisnawati B, Y. Astini, Dan R. N. O. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amm*, 15(1), 1–10.
- Kominfo. (2017). *Mendes Pdt: Tidak Ada Lagi Alasan Tak Gunakan Siskeudes*. Kominfo.Go.Id.
- Kusumawati, R. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa Bayasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 96–105.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Langelo, Friska, Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Emba*, 3(1), 1–8.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/Jiab.2017.V12.I02.P07>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).
- Mustopadidjaya A. R., 1944-. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kinerja / Mustopadidjaya A.R.* Lembaga Administrasi Negara : Duta Pertiwi Foundation.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1283>
- Ni Luh Putu Uttari Premananda Dan Ni Made Yenni Latrini. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2451–2476.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Pasaribu, F. J. (2009). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Skpd Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Skpd Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Skpd*.
- Pertiwi, P. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan. In *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Pertiwi, P. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Rahman, K. (2017). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 16(28), 34–42. <https://doi.org/10.35967/Jipn.V16i28.5823>
- Ramdhani, M. R. A. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Ridha, R. N., Burhanuddin, B., & Wahyu, B. P. (2017). Entrepreneurship Intention In Agricultural Sector Of Young Generation In Indonesia. *Asia Pacific Journal Of Innovation And Entrepreneurship*, 11(1), 76–89. <https://doi.org/10.1108/apjie-04-2017-022>
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Journal Of Business And Information Systems (E-Issn: 2685-2543)*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i1.11>
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- Royman, S. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykpn Yogyakarta.
- Sartono, A. (2016). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep Value For Money. 154115377, 1–95.
- Setiyaningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Di Yogyakarta. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta*, 162.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*.
- Sri Rahayu. (2010). Persepsi Pemerintah Daerah. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 12, 43–42.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cv Alfabeta.
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal Of Public Finance*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan Umkm*, 2(1), 52–66.
- Tempuran, D. (2021). *Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tempuran*.
- Theresia Dwi Hastuti, T., & Imam Ghozali, I. (2015). Manipulation Detection In Financial Statements. *International Journal Of Humanities And Management Sciences*, 3(4), 222–229.
- Ulum. (2009). Model Inter-Relasi Antar Komponen Modal Intelektual (Human Capital, Struktural Capital, Customer Capital) Dan Kinerja Perusahaan. *Humanity*, 1v (2), 194–140.
- Utami, K. Dan E. S. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Wra, Vol.1, No.*, 12–18.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (Senama)*, 1(1), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol 24 No 2 Tahun 2024, hal 171-184

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

Yanti, R. D. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Etika Kerja Islam Sebagai Variabel Moderasi*